



Peran Desentralisasi Fiskal Bagi Pembangunan

Azulaidin¹

¹Universitas Amir Hamzah Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 22, 2024

Revised April 27, 2024

Accepted April 30 2024

Available online May 02, 2024

Kata Kunci:

Desentralisasi, Fiskal, Pembangunan

Keywords:

Decentralization, Fiscal, Development



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRAK

Salah satu unsur penting dari kebijakan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal. Arti pentingnya kebijakan ini tentunya tidak hanya untuk memperbesar jumlah anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah, namun juga diharapkan dapat dikelola untuk peningkatan pembangunan daerah tersebut. Dengan kata lain, melalui anggaran tersebut diharapkan persoalan-persoalan pembangunan yang ada di daerah dapat teratasi. Dalam konteks Kota Medan, dengan diimplementasikannya desentralisasi fiskal diharapkan dapat mengatasi persoalan pengangguran. Melalui kebijakan ini diharapkan Pemerintah Kota Medan dapat menyokong tumbuhnya sektor kunci yang diharapkan. dapat memiliki dampak terhadap tumbuhnya sektor-sektor lainnya, meningkatnya output, kesempatan kerja, dan pendapatan daerah tersebut. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengalokasikan sebagian anggaran pada sektor-sektor kunci tersebut. Namun, beberapa faktor di atas belum tentu dapat berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi daerah. Salah satu faktor yang dapat menjadi hambatan utamanya adalah masalah kelembagaan yang dapat menjadi kontra-produktif terhadap upaya pembangunan ekonomi daerah termasuk dalam mengatasi masalah pengangguran. Untuk menyelidiki lebih lanjut, kondisi faktual dari kebijakan tersebut, beberapa hal berikut perlu

dipertanyakan: (1) Bagaimanakah struktur perekonomian Kota Medan ditinjau dari struktur output sektoral, struktur permintaan dan penawaran, struktur konsumsi, struktur investasi dan perubahan stok, struktur ekspor dan impor serta struktur nilai tambah bruto (pendapatan daerah).

ABSTRACT

One of the important elements of regional autonomy policy is fiscal decentralization. The importance of this policy is certainly not only to increase the amount of budget that can be managed by the regional government, but it is also expected to be managed to improve regional development. In other words, through this budget, it is hoped that development problems in the region can be resolved. In the context of Medan City, the implementation of fiscal decentralization is expected to overcome the problem of unemployment. Through this policy, it is hoped that the Medan City Government can support the growth of the expected key sectors. can have an impact on the growth of other sectors, increasing output, employment opportunities, and regional income. This can be done, among others, by allocating part of the budget to these key sectors. However, some of the factors above may not necessarily have a positive impact on regional economic development. One of the factors that can be the main obstacle is institutional problems that can be counter-productive to efforts to develop the regional economy, including in overcoming the problem of unemployment. To investigate further, the factual conditions of the policy, the following things need to be questioned: (1) How is the economic structure of Medan City reviewed from the sectoral output structure, demand and supply structure, consumption structure, investment structure and stock changes, export and import structure and gross value added structure (regional income).

PENDAHULUAN

Peningkatan pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu harapan utama diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah. Untuk mencapai peningkatan pembangunan ekonomi tersebut, banyak pihak yang berkeyakinan bahwa penerapan desentralisasi fiskal dapat menjamin efektivitas pencapaian tersebut. Beberapa studi terdahulu telah mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi. Zhang dan Zou (2007) menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi regional di India. Studi yang dilakukan oleh Lin dan Liu (2000) di China juga menemukan kecenderungan yang sama. Yudhoyono (2004) menemukan bahwa tingkat pengangguran secara nyata dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan desentralisasi. Berdasarkan hasil studinya, semakin besar alokasi

pengeluaran pemerintah untuk perbaikan infrastruktur, maka semakin besar penurunan angka pengangguran. Pardede (2004) dalam studinya di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kota Medan menemukan bahwa pengeluaran pemerintah yang berasal dari pusat sangat berperan dalam menciptakan output, pendapatan dan kesempatan kerja. Namun demikian, penerapan desentralisasi fiskal belum tentu dapat menjamin peningkatan pembangunan ekonomi. Salah satu kemungkinan faktor penyebabnya adalah masalah kelembagaan termasuk perilaku korup para pejabat pemerintah.

Pembangunan ekonomi juga bergantung pada dukungan aspek kelembagaan kota tersebut. Untuk mengamankan pembangunan tersebut dari praktek penyalahgunaan kekuasaan yang dapat memperlemah pembangunan maka diperlukan berjalannya mekanisme checks and balances antar para penyelenggara pemerintahan kota tersebut. Karena pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu kewenangan yang sangat rawan penyalahgunaan kekuasaan maka mekanisme checks and balances antar penyelenggara kewenangan tersebut sangat diperlukan. Mekanisme checks and balances tersebut tidak hanya antar institusi dalam pemerintahan tetapi juga antar pemerintah dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Mekanisme ini perlu tercermin baik dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah maupun implementasinya.

KAJIAN PUSTAKA

Semakin besarnya kewenangan dan tanggung jawab tersebut tentunya diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk berprakarsa dalam menentukan prioritas, memilih alternatif, dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan daerahnya. Sehingga perbedaan karakteristik daerah ditinjau dari kondisi, kebutuhan, sumber daya, aspirasi dan bahkan skala prioritas diharapkan dapat terakomodasi dalam pengelolaan kebijakan karena daerah dianggap lebih mengetahui kondisi daerahnya.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa tabel input output Kota Medan tahun 2022 (sebelum desentralisasi fiskal) dan 2023 (sesudah diterapkannya desentralisasi fiskal), beberapa data perekonomian serta data kualitatif dari berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan berbagai informasi media masa khususnya media masa lokal dari tahun 2022 (sebelum diberlakukannya otonomi daerah) sampai saat ini. Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk menjawab permasalahan 1 digunakan metode analisis tabel input output; permasalahan 2 dan 3 dikaji dengan berdasarkan analisis keterkaitan dan analisis dampak (multiplier) dengan mengolah lebih lanjut tabel input output.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses implementasi desentralisasi fiskal tidak dapat dipisahkan dari proses kelembagaan. Ditinjau dari prinsip disiplin fiskal, tampak bahwa MTEF (*Medium-Term Economic Framework*) belum dijadikan sebagai agenda strategik beberapa tahun ke depan sehingga belum dijadikan sebagai payung skenario kebijakan Pemda. Di samping itu, MTEF belum dijadikan sebagai informasi publik yang dapat meyakinkan publik kemana daerah ini akan dibawa. Sesuai dengan prinsip *allocative efficiency* seharusnya Pemerintah Kota mengalokasikan anggarannya terutama untuk sektor-sektor strategik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun dalam kenyataannya seiring dengan semakin meningkatnya euforia demokrasi dan menguatnya posisi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tampaknya anggaran paska diberlakukannya otonomi daerah untuk 'penguasa' juga meningkat. Beberapa diantara pos anggaran tersebut adalah anggaran untuk anggota DPRD dan anggaran rutin. Spirit efisiensi yang sejatinya menjadi elan vital dalam operasionalisasi anggaran juga masih belum teraktualisasikan. Persepsi yang menyesatkan di kalangan para pelaksana bahwa anggaran harus dihabiskan karena kalau tidak maka dianggap gagal menjadi salah satu penghambat berkembangluasnya spirit efisiensi. Faktor penghambat lainnya adalah tidak adanya faktor pendorong berupa insentif efisiensi. Insentif ini kalau diterapkan maka dapat mengurangi praktek manipulasi untuk illegal saving (tabungan ilegal atau tidak dilaporkan) di akhir tahun.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap output, pendapatan, kesempatan kerja, dan kelembagaan Kota Medan dihasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, dalam struktur perekonomian Kota Medan, sektor industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, dan sektor perdagangan eceran masing-masing memiliki peringkat pertama dan kedua pada struktur output, nilai tambah bruto dan struktur ekspor sehingga kedua sektor tersebut memiliki peranan yang penting dalam pembangunan perekonomian Kota Medan. Kedua, dilihat dari keterkaitan kedepan dan keterkaitan kebelakang dan nilai efek penyebaran kedepan dan kebelakang baik pada periode sebelum otonomi

daerah (tahun 2022) maupun sesudahnya (2023) maka beberapa sektor yang perlu diprioritaskan adalah penginapan (hotel bintang dan non bintang) dan komunikasi. Di samping itu, terdapat juga kecenderungan semakin menguatnya peran sektor-sektor jasa pada tahun 2023. Ketiga, sementara itu, dilihat dari multiplier output, pendapatan dan kesempatan kerja, sektor penginapan (hotel bintang dan non bintang) dan sektor komunikasi perlu mendapat prioritas. Keduanya seringkali masuk dalam peringkat 10 besar. Bahkan, keduanya beberapa kali menempati posisi tiga besar baik pada tahun 2022 maupun 2023. Keempat, dari evaluasi desentralisasi fiskal dengan menganalisis dampak desentralisasi fiskal tahun 2022 dan tahun 2023 diketahui bahwa dalam periode tersebut terdapat kenaikan output dan pendapatan. Namun, pada periode yang sama, kesempatan kerja cenderung menurun.

Jika dibandingkan dengan kontribusi investasi swasta ternyata kontribusi desentralisasi fiskal masih lebih besar. Kelima, dari simulasi yang dilakukan dengan merealokasi anggaran terhadap beberapa sektor prioritas termasuk penginapan (hotel bintang dan non bintang), dan komunikasi; dan sektor non-prioritas yaitu pertanian dapat disimpulkan bahwa output dan pendapatan dapat ditingkatkan dengan mengalokasikan anggaran ke sektor prioritas seperti penginapan (hotel bintang dan non bintang), dan komunikasi. Sementara itu, alokasi anggaran untuk sektor pertanian dapat meningkatkan kesempatan kerja. Namun, dalam keadaan keterbatasan anggaran dan besarnya minat swasta maka upaya mengembangkan perekonomian Kota Medan melalui sektor-sektor unggulan dapat dilakukan dengan menarik para investor untuk masuk ke sektor penginapan (hotel bintang dan non bintang) dan komunikasi. Keenam, pada aspek kelembagaan, walaupun paska diberlakukannya desentralisasi, sistem keuangan negara sudah berbasis kinerja namun dalam realisasinya masih terdapat beberapa kelemahan. Dari aspek disiplin fiskal, kelemahan dari kelembagaan pengelolaan keuangan adalah kurang dipublikasikannya agenda MTEF sehingga masyarakat tidak tahu agenda utama Pemerintah Kota Medan ke depan. Dari aspek efisiensi alokasi, masih terdapat misalokasi anggaran serta perencanaan keuangan daerah yang kurang partisipatif. Dari aspek efisiensi operasional, kelemahannya adalah kurang diadvokasikannya efisiensi sebagai tolok ukur kinerja. Di samping itu, rendahnya gaji PNS juga dapat menjadi penghambat efisiensi operasional.

REFERENSI

- Lin, J. and Z. Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change* 49 (1): 1-22.
- Pardede, Ratlan. 2004. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kota Medan: Aplikasi Model Input-Output. Disertasi Doktor pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. 2004. *Kebijakan Fiskal Indonesia: Dinamika, Permasalahan, dan pilihan*. Brighten Press, Bogor.